

ANALYSIS OF FLYPAPER EFFECT REVENUE SHARING FUND (DBH)
AND REGIONALLY GENERATED REVENUE (PAD) TOWARD
CAPITAL EXPENDITURE BY DISTRICT / TOWN IN
SOUTH SUMATERA 2009-2011

Marliana
Mukhtaruddin
Ika Sasti Ferina

Sriwijaya University, Palembang, Indonesia

Abstract

This research aims to identify the influence of *Flypaper Effect* Revenue Sharing Fund (DBH) and Regionally Generated Revenue (PAD) toward capital expenditure by District / Town in South Sumatra 2009-2011. The population in this research was all of District / Town in South Sumatra in 2009 until 2011 and can be accessed at www.djpk.depkeu.go.id Site. Total Sample in this research is 15 districts /towns which consist of 11 districts and 4 towns in South Sumatra. Data were analyzed with tests of classic assumption and examination of hypothesis with multiple linear regression method.

Based on the F test results indicate that the DBH and the PAD have influence on capital expenditure. Then through t test shows that DBH showed an influence on the probability of capital expenditure under the $\alpha = 5\%$ (0.000). While the PAD has no effect on the profitability of capital expenditure above $\alpha = 5\%$ (0.60). From the results of this study also demonstrated the occurrence of flypaper in districts / towns in South Sumatra, but had no *flypaper effect* against capital expenditure forecast.

Keywords: *Capital Expenditure, Revenue Sharing Fund, Flypaper Effect, Regionally Generated Revenue*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No.22 tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang

dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi sesungguhnya.

Dalam UU No.32 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut

diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Seharusnya dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemda untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel. (Maimunah, 2006).

Tujuan utama implementasi transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah adalah untuk merubah dari eksternalisasi fiskal menjadi internalisasi, perbaikan sistem perpajakan, koreksi ketidakefisienan fiskal dan pemerataan fiskal antardaerah. Alokasi transfer dinegara sedang berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal. Akibatnya, dari tahun ketahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat.

Pajak daerah dan retribusi daerah sebaiknya mampu membiayai belanja pemerintah daerah. Perbedaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah menghasilkan perbedaan penerimaannya yang selanjutnya menghasilkan pula perbedaan belanja dari pemerintah daerah. Kondisi ini bukan berarti daerah harus mampu membiayai semua belanjanya dari PAD, karena bukan itu yang dimaksud dengan kemandirian keuangan daerah. Hal yang terpenting dalam konteks otonomi daerah adalah adanya sejumlah sumber penerimaan yang cukup signifikan bagi daerah untuk memanfaatkannya secara leluasa.

Dominannya peran transfer relatif terhadap PAD dalam

membiayai belanja pemerintah daerah sebenarnya tidak memberikan panduan bagi governansi terhadap aliran transfer itu sendiri. Bukti-bukti empiris secara internasional menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan pada transfer ternyata berhubungan negatif dengan hasil governansinya. Hal ini berarti pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam menggunakan dana yang digali dari masyarakat sendiri daripada uang “hadiah” yang diterima dari pemerintah pusat. Pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh pemda dilaporkan diperhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Mardiasmo, 2009). Pembiayaan pemerintah atas dasar desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan (DBH, DAU dan DAK) dan pinjaman daerah, Dekonsentrasi

dan tugas Pembantuan. Tiga sumber utama langsung dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah (Halim,2008).

Menurut Halim (2008) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber –sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Dengan adanya otonomi daerah berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah *financial*. Meski begitu pemerintah pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari dana bagi hasil pajak & dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) yang ditransfer ke pemerintah daerah. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu.

Dalam praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama pemerintah daerah, yang oleh pemerintah daerah “dilaporkan” diperhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri (Maimunah,2006).

Dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dijelaskan bahwa penetapan kriteria untuk menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas

wilayah dan APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% untuk variabel jumlah penduduk, 35% untuk variabel luas wilayah dan 25% untuk variabel luas APBD. Demikian juga dengan susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah.

Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar dari pada penerimaan itu sendiri. *Flypaper effect* merupakan fenomena dalam penelitian ini. *Flypaper effect* disebut sebagai kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer yang diprosikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD (Maimunah,2006).

Menurut Maimunah (2008) besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai belanja daerah. Terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah pada kabupaten/kota di Sumatera pada bidang kesehatan dan pekerjaan umum sedangkan pada bidang pendidikan tidak. *Flypaper effect* berpengaruh dalam memprediksi belanja daerah. Tidak terdapat perbedaan terjadinya *flypaper effect* baik pada daerah yang PADnya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi pada kota/kabupaten di Sumatera.

Menurut Kuncoro (2007) Fenomena *flypaper Effect* pada kinerja keuangan pemerintah daerah

kota dan kabupaten di Indonesia mengambil penelitian secara runtun mencakup periode penelitian 1998-2003. Peningkatan alokasi transfer diikuti dengan penggalan PAD yang lebih tinggi. Simpulan ini mengindikasikan sikap overaktif pemerintah daerah terhadap arti pentingnya transfer. Penggalan PAD yang hanya didasarkan pada faktor inkremental akan berakibat negatif pada perekonomian daerah.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini mengacu kepada peneliti-peneliti sebelumnya. Beda penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti terdahulu meneliti *Flypaper Effect* DAU dan PAD terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia, Sumatera, Jawa dan Bali. Peneliti sekarang meneliti *Flypaper Effect* DBH dan PAD terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran

pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi fenomena *Flypaper effect* pada pengaruh DBH dan PAD terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Selain itu juga untuk mengetahui apakah Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan.. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui apakah *flypaper effect* cenderung menyebabkan peningkatan belanja modal.

LANDASAN TEORETIS

Teori Keagenan

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan *principal* dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agen*)

dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (Darwanto, 2007).

Dalam perspektif teori keagenan, Inman (1979) dan Rubinfeld (1987) (dalam Holtz-Eakin et al, 1994), (Aaberge & Langorgen (1997), dan Slack (1980), dikutip dalam Prakoso, 2004) menyatakan bahwa agen (*agents*) atau politisi di Pemda bersikap seolah-olah mereka memaksimalkan utilitas individu (*voter*) berpendapatan menengah kebawah di dalam masyarakat. Apabila dikaitkan dengan belanja publik untuk periode tertentu, agen akan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya berdasarkan pada ekspektasinya terhadap lingkungan ekonomi pada masa yang akan datang. Secara teoritis diasumsikan bahwa semua pengeluaran pada suatu periode tertentu tergantung pada ketersediaan sumber daya pada periode yang bersangkutan, namun dalam batasan aturan anggaran yang ada, misalnya anggaran berimbang (*balanced budget-rule*).

Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH)

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2008). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang

bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu (Nordiawan, 2010). Dana Bagi Hasil terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak & Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

Flypaper Effect

Menurut Maimunah (2006) *Flypaper effect* disebut sebagai kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer yang diprosikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD, spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau *unconditional grants* dari pada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan pada belanja daerah. *Unconditional grants* yang di proksikan dengan DAU ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi dasar yang dialokasikan secara keseluruhan dari pemerintah pusat.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh DBH & PAD terhadap belanja modal

Dalam beberapa penelitian, hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah mempengaruhi anggaran belanja Pemerintah daerah disebut dengan *tax-spend hypothesis*.

Hipotesis ini mengandung makna bahwa kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja daerah disesuaikan dengan pendapatan daerah yang diterima. Namun di sisi lain, transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat juga turut mempengaruhi besarnya anggaran belanja daerah yang akan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah.

Legrensi dan Milas (2001) dalam Maimunah (2005) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel *municipalities* di Italia dan memperoleh hasil bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja Daerah. Kebijakan-kebijakan belanja daerah jangka pendek yang dibuat Pemerintah daerah sangat bergantung pada transfer yang diterima. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁ : DBH & PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

H₂ : DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

H₃ : PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh *flypaper effect* terhadap prediksi belanja modal

Holtz-Eakin et al, dalam Maimunah (2008) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga

memungkinkan terjadinya respon yang non-linier dan asymmetric. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Halim (2004) bahwa daya prediksi DAU terhadap belanja daerah adalah lebih kuat pada regresi dengan *lag* (DAU tahun 2001 terhadap belanja daerah tahun 2002).

Dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Terjadi *flypaper Effect* pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan

H₅ : *Flypaper effect* berpengaruh terhadap prediksi belanja modal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan keadaan suatu variabel secara mandiri, menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya. Metode kuantitatif menggunakan angka-angka dan data statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan yang mempublikasikan laporan APBDnya secara lengkap dari tahun 2009-2011 dalam situs www.djpk.depkeu.go.id. Terdapat 15 kabupaten/kota yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yang terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 Kota di Sumatera Selatan.

Daftar Sampel Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Banyuasin
2	Kabupaten Empat Lawang
3	Kabupaten Lahat
4	Kabupaten Muara Enim
5	Kabupaten Musi Banyuasin
6	Kabupaten Musi Rawas
7	Kabupaten Ogan Ilir
8	Kabupaten Ogan Komering Ilir
9	Kabupaten Ogan Komering Ulu
10	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
11	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
12	Kota LubukLinggau
13	Kota Pagar Alam
14	Kota Palembang
15	Kota Prabumulih

Sumber www.id.wikipedia.org.

**Variabel Penelitian dan Definisi
Operasional Variabel**

• **Variabel Penelitian**

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independent atau variabel yang mempengaruhi yaitu Dana Bagi Hasil (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (X_2) sedangkan yang menjadi variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi adalah Belanja Modal (Y).

• **Definisi Operasional Variabel**

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Nordiawan, 2010). Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana

bagi hasil sumber daya manusia.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam UU RI No 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

3. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Darwanto (2007), belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah asset).

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Berikut model analisis yang dibangun.

$$Y = \alpha + b_1DBH + b_2PAD + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

α = konstanta

b = koefisien regresi

DBH = Dana Bagi Hasil

PAD = Pendapatan Asli Daerah

e = error

Data Penelitian

Untuk mengetahui gambaran kondisi dari variabel dalam penelitian ini maka dilakukan analisis deskriptif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri DBH dan PAD. Sedangkan variabel dependennya adalah belanja modal. Deskripsi dari variabel penelitian tersebut sebagai berikut:

Gambaran DBH Tahun 2009-2011

Gambaran data DBH tahun 2009-2011 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Rekapitulasi Dana Bagi Hasil Tahun 2009-2011

No	Kabupaten/Kota	DBH (dalam jutaan rupiah)		
		2009	2010	2011
1	Kab. Lahat	279.984	252.711	235.979
2	Kab. Musi Banyuasin	977.031	1.130.539	1.363.611
3	Kab. Musi Rawas	418.754	577.337	485.697
4	Kab. Muara Enim	426.885	424.595	458.447
5	Kab. Ogan Komering Ilir	174.788	126.344	161.274
6	Kab. Ogan Komering Ulu	190.630	189.548	204.658
7	Kota Palembang	246.895	229.936	243.247
8	Kota Prabumulih	148.113	157.194	170.494
9	Kota Pagar Alam	125.407	147.673	164.216
10	Kota Lubuk Linggau	89.569	103.309	151.582
11	Kab. Banyuasin	220.020	207.854	208.460
12	Kab. Ogan Ilir	307.440	290.867	234.087
13	Kab. OKU Timur	196.872	174.974	150.904
14	Kab. Oku Selatan	96.856	100.305	117.527
15	Kab. Empat Lawang	113.086	152.143	196.082
	Nilai Maksimal	977.031	1.130.539	161.274
	Nilai Minimal	89.569	100.305	117.527
	Rata-rata	267.489	208.986	212.177

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui statistik deskriptif data penelitian variabel independen (X_1). Pada tahun 2009 DBH tertinggi terdapat pada Kabupaten Musi Banyuasin yaitu sebesar 977.031, DBH terendah tahun 2009 terdapat pada Kota Lubuk Linggau yaitu sebesar 89.569. Rata-rata DBH untuk tahun 2009 sebesar 267.489. Tahun 2010 DBH tertinggi kembali pada

Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 1.130.539 DBH terendah terdapat di OKU Selatan sebesar 100.305. Rata-rata DBH tahun 2010 sebesar 208.986. Kabupaten Musi Banyuasin kembali mendapat DBH tertinggi tahun 2011 sebesar 161.274. DBH terendah 2011 sebesar 117.527 pada kabupaten OKU Selatan. Rata-rata DBH tahun 2011 sebesar 212.177.

Gambaran PAD Tahun 2009-2011

Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009-2011

No	Kabupaten/Kota	PAD (dalam jutaan rupiah)		
		2009	2010	2011
1	Kab. Lahat	40.500	35.151	51.733
2	Kab. Musi Banyuasin	32.570	39.773	53.749
3	Kab. Musi Rawas	53.223	60.000	72.506
4	Kab. Muara Enim	58.121	70.908	62.161
5	Kab. Ogan Komering Ilir	30.506	30.051	37.479
6	Kab. Ogan Komering Ulu	37.413	38.598	39.866
7	Kota Palembang	196.108	224.461	263.010
8	Kota Prabumulih	16.826	21.146	24.009
9	Kota Pagar Alam	10.000	12.502	18.957
10	Kota Lubuk Linggau	25.378	28.830	30.135
11	Kab. Banyuasin	20.005	20.005	28.376
12	Kab. Ogan Ilir	15.252	25.867	16.102
13	Kab. OKU Timur	11.087	31.717	26.487
14	Kab. Oku Selatan	4.555	6.594	13.113
15	Kab. Empat Lawang	6.089	10.060	10.905
	Nilai Maksimal	196.108	224.461	263.010
	Nilai Minimal	4.555	6.594	10.905
	Rata-rata	37.176	43.711	49.906

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui statistik deskriptif dari variabel independen (X_2) PAD. Tahun 2009, dari 15 sampel kabupaten/kota di Sumatera Selatan diketahui nilai PAD tertinggi adalah 196.108 yaitu PAD Kota Palembang,

nilai PAD terendah 4.555 pada Kabupaten OKU Selatan. Rata-rata PAD tahun 2009 sebesar 37.176. Tahun 2010, nilai PAD tertinggi kembali pada kota Palembang yaitu 224.461. Nilai PAD terendah tahun 2010 terdapat di OKU Selatan

sebesar 6.594. Rata-rata PAD tahun 2010 sebesar 43.711. PAD tertinggi tahun 2011 sebesar 263.010 terdapat di kota Palembang sedangkan PAD

terendah yaitu 10.905 terdapat di kabupaten Empat Lawang. Rata-rata PAD tahun 2011 sebesar 49.906.

Gambaran Belanja Modal Tahun 2009-2011

Rekapitulasi Belanja Modal Tahun 2009-2011

No	Kabupaten/Kota	Belanja Modal (dalam jutaan rupiah)		
		2009	2010	2011
1	Kab. Lahat	193.699	147.255	170.889
2	Kab. Musi Banyuasin	494.747	460.104	760.652
3	Kab. Musi Rawas	455.598	429.410	302.550
4	Kab. Muara Enim	384.043	269.988	315.664
5	Kab. Ogan Komering Ilir	175.749	158.019	210.934
6	Kab. Ogan Komering Ulu	134.396	179.272	180.849
7	Kota Palembang	250.954	248.045	274.642
8	Kota Prabumulih	200.516	170.206	115.123
9	Kota Pagar Alam	178.566	93.173	150.506
10	Kota Lubuk Linggau	135.894	149.773	185.980
11	Kab. Banyuasin	190.735	219.567	273.562
12	Kab. Ogan Ilir	248.209	254.217	144.221
13	Kab. OKU Timur	183.806	121.988	203.774
14	Kab. Oku Selatan	197.443	92.825	244.855
15	Kab. Empat Lawang	159.346	123.048	157.864
	Nilai Maksimal	494.747	460.104	760.652
	Nilai Minimal	134.396	92.825	115.123
	Rata-rata	238.913	207.793	246.183

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui statistik deskriptif variabel dependen (Y) belanja modal. Tahun 2009 jumlah belanja modal tertinggi sebesar 494.747 yang terdapat di kabupaten Musi Banyuasin. Belanja modal terendah sebesar 134.396 pada kabupaten Ogan Komering Ulu. Rata-rata belanja modal tahun 2009 sebesar 238.913. Tahun 2010 jumlah belanja modal tertinggi terdapat di kabupaten Musi Banyuasin sebesar 460.104 sedangkan belanja modal

terendah tahun 2010 sebesar 92.825 terdapat di kabupaten OKU Selatan. Rata-rata belanja modal tahun 2010 sebesar 207.793. Tahun 2011 Musi Banyuasin kembali memegang jumlah belanja modal tertinggi sebesar 760.652. Belanja modal terendah 2011 sebesar 115.123 terdapat di kota Prabumulih. Rata-rata belanja modal tahun 2011 sebesar 246.183.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian dengan berbagai pengujian yang dilakukan menggunakan *SPSS* mendapatkan hasil sebagai berikut :

Deskripsi Data Secara Statistik

Dari data yang diperoleh sebanyak 15 sampel setiap tahunnya diperoleh statistik deskriptif yang mencakup n (banyaknya data yang diperoleh), nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi atas variabel-variabel penelitian yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal.

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	45	92825	760652	230947.91	126204.614
DBH	45	89569	1363611	284975.20	263851.548
PAD	45	4555	263010	43596.02	53223.491
Valid N (listwise)	45				

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa (dalam jutaan rupiah):

1. Rata-rata DBH (X_1) adalah 284975.20 dengan standar deviasi sebesar 2.63851.548 dan jumlah data yang ada sebanyak 45. Nilai DBH (X_1) terendah adalah 89569 dan nilai DBH (X_1) tertinggi adalah 1363611
2. Rata-rata dari PAD (X_2) adalah 43596.02 dengan standar deviasi sebesar 53223.491 dan jumlah yang ada sebanyak 45. Nilai

PAD (X_2) terendah adalah 4555 dan nilai PAD (X_2) tertinggi adalah 263010

3. Rata-rata dari belanja modal (Y) adalah 230947.91 dengan standar deviasi sebesar 126204.614 dan jumlah data yang ada sebanyak 45. Nilai belanja modal (Y) terendah adalah 92825.00 dan nilai belanja daerah (Y) tertinggi adalah 760652

Uji Asumsi Klasik

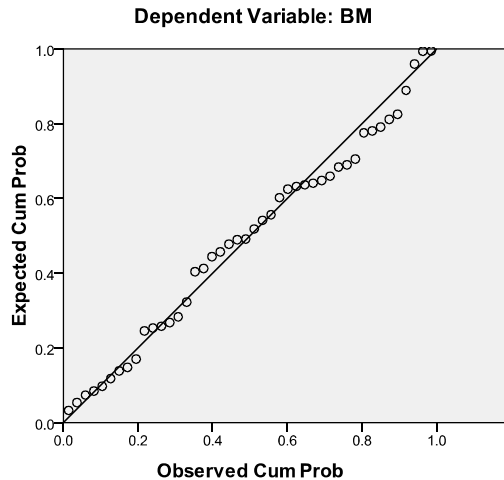
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan menggunakan analisis regresi sehingga terhadap data penelitian terlebih dahulu harus dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari:

1. Uji Normalitas

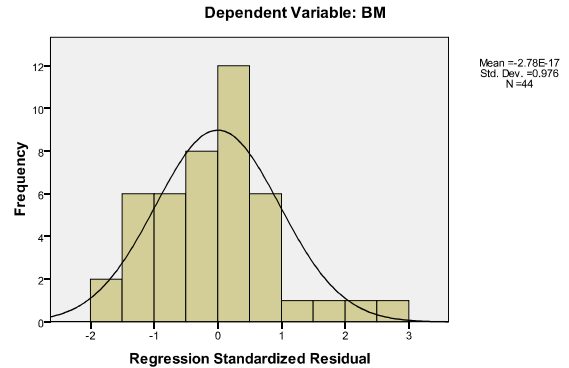
Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data variabel

dependen yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta variabel independen yaitu Belanja Modal berdistribusi normal ataukah tidak. Pengujian normalitas ini dilakukan dengan menggunakan analisis *normal probability plot*, *histogram*, *kolmogorov-smirnov*.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Histogram



Dari grafik normal probability plot diatas dapat dilihat bahwa sebaran data yang digunakan dalam penelitian ini membentuk titik-titik yang letaknya menyebar disekitar garis normal.

Begitu juga dari grafik histogram dapat dilihat bahwa grafik tidak menceng ke kanan atau ke kiri maka dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		BM
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	230947.91
	Std. Deviation	126204.614
Most Extreme Differences	Absolute	.187
	Positive	.187
	Negative	-.137
Kolmogorov-Smirnov Z		1.253
Asymp. Sig. (2-tailed)		.086

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil pengujian *kolmogorov-smirnov* maka dapat disimpulkan bahwa data mempunyai distribusi normal dengan nilai signifikansi 0,086. Sesuai dengan ketentuan apabila nilai

signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal, apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar

variabel independen. Hasil pengujian dengan menggunakan spss adalah sebagai berikut:

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	97230.171	13049.258		7.451	.000		
	DBH	.424	.031	.887	13.784	.000	.985	1.015
	PAD	.295	.153	.124	1.932	.060	.985	1.015

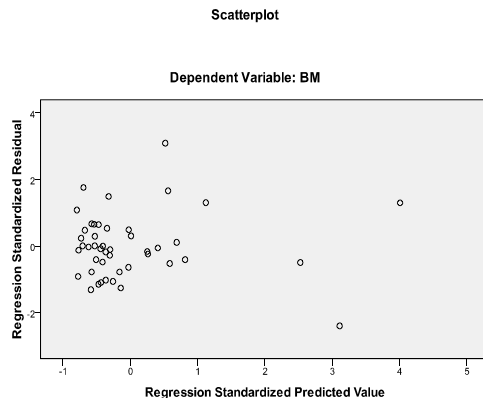
a. Dependent Variable: BM

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance tidak ada yang kurang dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factors (VIF)* tidak ada

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

yang lebih besar dari 10, mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel independen dalam penelitian. ketidaksamaan (*varians*) antara satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Penulis menggunakan *scatter plot* untuk melakukan pengujian ini dengan hasil sebagai berikut:



Dari *scatter plot* diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tidak membentuk pola tertentu atau tidak teratur. Hal ini mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model

regresi sehingga model regresi layak dipakai.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi biasanya digunakan tes Durbin Watson (DW).

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.910 ^a	.829	.821	53447.43275	1.860

a. Predictors: (Constant), PAD, DBH

b. Dependent Variable: BM

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai dw sebesar 1.860. Nilai ini dibandingkan dengan tabel jumlah nilai observasi 45 (n=45) dan variabel independen (K) sebanyak 2, maka dari tabel statistik Durbin-Watson didapatkan nilai dl sebesar 1.430 dan nilai du sebesar 1.615. Nilai dw berada diantara du

dan 4-du (1.430<1.860<2.385) berarti tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda, bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas. Hasil analisis regresi disajikan dalam tabel di bawah ini:

Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	97229.495	13049.287		7.451	.000
	DBH	.424	.031	.887	13.784	.000
	PAD	.295	.153	.124	1.932	.060

a. Dependent Variable: BM

Dari tabel diatas dapat diketahui persamaan regresi linier berganda adalah (dalam jutaan rupiah):

$$\text{belanja modal} = 97229.495 + 0.424\text{DBH} + 0.295\text{PAD}$$

Angka konstan *unstandardized coefficients* yang dalam penelitian ini sebesar 97229.495. Angka ini berupa angka konstan yang berarti, besarnya akuntabilitas belanja modal saat nilai X_1 dan X_2 sama dengan 0. DBH memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0.424, artinya apabila terjadi perubahan variabel DBH sebesar 1% akan menaikkan belanja modal sebesar 0.424 atau 42%. PAD

memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0.295, artinya apabila terjadi perubahan variabel PAD sebesar 1% akan menaikkan belanja modal sebesar 0.295 atau 29%.

Uji Hipotesis

1. Uji F (uji signifikansi simultan)

Untuk mengetahui apakah DBH dan PAD secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dilakukan uji statistik F. hasil uji statistik F dengan program SPSS 17.0 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.808E11	2	2.904E11	101.665	.000 ^a
	Residual	1.200E11	42	2.857E9		
	Total	7.008E11	44			

a. Predictors: (Constant), PAD, DBH

b. Dependent Variable: BM

Dari tabel diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar 101.665 dengan tingkat signifikasinya 0,000 ($< 0,05$). Signifikasi F sebesar 0,000 menunjukkan tingkat kesalahan model yang diajukan. Nilai ini menunjukkan tingkat kesalahan yang akan ditanggung sebagai peneliti bila menolak hipotesa null. Dengan demikian maka tingkat kesalahan yang akan ditanggung kalau peneliti mengatakan bahwa X_1 dan X_2 mampu

menjelaskan Y adalah 0,000. Tingkat kesalahan ini sangat jauh dibawah nilai α yang sudah ditetapkan diawal yaitu 5%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa DBH (X_1), PAD (X_2) secara bersamaan berpengaruh terhadap belanja modal.

2. Uji t (uji signifikasi parameter individual)

Uji parsial (t-test) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	97230.171	13049.258		7.451	.000		
	DBH	.424	.031	.887	13.784	.000	.985	1.015
	PAD	.295	.153	.124	1.932	.060	.985	1.015

a. Dependent Variable: BM

Uji t dilihat dari tingkat signifikasinya masing-masing variabel. Jika nilai sig dibawah 0,05, maka masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan pegujian yang telah dilakukan terlihat bahwa variabel DBH memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000. hasil tersebut membuktikan bahwa DBH

secara individual mempengaruhi belanja modal. Untuk variabel yang kedua yaitu PAD memiliki nilai signifikansi sebesar 0.060. hasil tersebut membuktikan bahwa PAD secara individual tidak mempengaruhi belanja modal.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan adanya

pengaruh DBH terhadap belanja modal dapat diterima. Hipotesis ketiga yang menyatakan adanya pengaruh PAD terhadap belanja modal ditolak karena nilai signifikansinya lebih besar yaitu $0,05 < 0,060$. Menurut Maimunah (2008) Untuk menunjukkan kemungkinan terjadi atau tidaknya *flypaper effect*, maka hasil yang diperoleh dari uji simultan haruslah menunjukkan syarat 1. nilai koefisien DBH lebih besar dari nilai koefisien PAD dan keduanya signifikan, atau 2. PAD tidak signifikan.

Hasil yang didapat adalah nilai PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap belanja modal. Hal tersebut berarti telah terjadi *flypaper effect* karena sesuai dengan syarat kedua

yaitu bila PAD tidak signifikan maka menunjukkan telah terjadinya *flypaper effect*. Dengan demikian hipotesis ke empat yang menyatakan terjadi *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan diterima. Untuk memprediksi kecenderungan peningkatan belanja modal karena adanya *flypaper effect* dilakukan regresi dengan *lag* satu tahun dan hasil yang ada pada pengujian tersebut dibandingkan dengan pengujian tanpa *lag* yakni antara:

1. DBH 2009 dan PAD 2009 terhadap belanja modal 2010 dibandingkan dengan DBH 2009 dan PAD 2009 terhadap belanja modal 2009.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	102115.894	26223.717		3.894	.002
DBH 2009	.283	.055	.795	5.165	.000
PAD 2009	.395	.277	.219	1.425	.180

a. Dependent Variable: BM 2010

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	135205.131	26814.389		5.042	.000
DBH 2009	.297	.056	.817	5.289	.000
PAD 2009	.276	.283	.150	.973	.350

a. Dependent Variable: BM 2009

Dari hasil penelitian diatas didapat ketika digunakan *lag*, nilai koefisien DBH sebesar 0.283 lebih kecil dari DBH tanpa *lag* yaitu sebesar 0.297 sedangkan untuk PAD hasil yang didapat ketika digunakan *lag* nilai koefisien PAD sebesar 0.395

lebih besar dari PAD tanpa *lag* yaitu 0.276. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh pengaruh DBH_{t-1} (2009) terhadap BM_t (2010) lebih kecil dari DBH_t (2009) terhadap BM_t (2009) sedangkan pengaruh PAD_{t-1} (2009) terhadap BM_t (2010) lebih

besar dari PAD_t (2009) terhadap BM_t (2009).

2. DBH 2010 dan PAD 2010 terhadap belanja modal 2011

dibandingkan dengan DBH 2010 dan PAD 2010 terhadap belanja modal 2010.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	88500.220	28652.974		3.089	.009
DBH 2010	.527	.067	.907	7.812	.000
PAD 2010	.181	.340	.062	.533	.604

a. Dependent Variable: BM 2011

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	86004.819	20969.736		4.101	.001
DBH 2010	.361	.049	.866	7.320	.000
PAD 2010	.437	.249	.208	1.759	.104

a. Dependent Variable: BM 2010

Dari hasil penelitian diatas didapat ketika digunakan *lag*, nilai koefisien DBH sebesar 0.527 lebih besar dari DBH tanpa *lag* yaitu sebesar 0.361 sedangkan untuk PAD hasil yang didapat ketika digunakan *lag* nilai koefisien PAD sebesar 0.181 lebih kecil dari PAD tanpa *lag* yaitu

0.437. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh DBH_{t-1} (2010) terhadap BM_t (2011) lebih besar dari DBH_t (2010) terhadap BM_t (2011) sedangkan pengaruh PAD_{t-1} (2010) terhadap BM_t (2011) lebih kecil dari PAD_t (2010) terhadap BM_t (2010).

PEMBAHASAN

Pengaruh DBH & PAD terhadap belanja modal

Legrensi dan Milas (2001) dalam Maimunah (2005) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel *municipalities* di Italia dan memperoleh hasil bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja Daerah. Kebijakan-kebijakan belanja daerah jangka pendek yang dibuat Pemerintah daerah sangat bergantung pada transfer yang diterima.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa DBH dan PAD secara bersamaan berpengaruh terhadap belanja modal diterima. Berdasarkan uji statistik diperoleh nilai F hitung sebesar 101.665 dengan tingkat signifikasinya 0,000 ($< 0,05$). Signifikasi F sebesar 0,000 menunjukkan tingkat kesalahan model yang diajukan. Nilai ini menunjukkan tingkat kesalahan yang akan ditanggung sebagai peneliti bila menolak hipotesa null. Dengan

demikian maka tingkat kesalahan yang akan ditanggung kalau peneliti mengatakan bahwa X_1 dan X_2 mampu menjelaskan Y adalah 0,000. Tingkat kesalahan ini sangat jauh dibawah nilai α yang sudah ditetapkan diawal yaitu 5%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa DBH (X_1), PAD (X_2) secara bersamaan berpengaruh terhadap belanja modal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (2008) hasil pengujian diperoleh nilai F hitung dari kedua variabel independen secara serentak adalah 7297.50941 dengan tingkat signifikan sebesar 0. Ini berarti hal ini tidak dapat di tolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU dan PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal diterima.

Maimunah (2008) sebelumnya telah meneliti apakah DAU secara individual berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Nilai t hitung untuk DAU pada derajat kepercayaan 5% ($\alpha = 0,05$) yaitu 84,01529564, sedangkan P Value t hitungnya yaitu 0. Dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa nilai P value untuk PAD lebih kecil daripada derajat kepercayaannya ($0 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara individual DAU juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja daerah.

Hasil penelitian hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan DBH secara individual berpengaruh terhadap belanja modal diterima (tabel 5.7.). Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa variabel DBH memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000. hasil tersebut membuktikan bahwa DBH secara individual mempengaruhi belanja modal. Hasil ini sejalan

dengan hasil yang didapat oleh peneliti sebelumnya.

Hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa PAD secara individual berpengaruh signifikan terhadap belanja modal telah diteliti sebelumnya oleh Maimunah (2008). Dari hasil analisa diketahui nilai t hitung untuk PAD pada derajat kepercayaan 5% ($\alpha = 0,05$) yaitu 26,56354712, sedangkan P Value t hitungnya yaitu 7,6055E-107. Dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa nilai P value untuk PAD lebih kecil daripada derajat kepercayaannya ($7,6055E-107 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara individual PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja daerah.

Hipotesis ketiga (H_3) ditolak karena untuk variabel yang kedua yaitu PAD memiliki nilai signifikansi sebesar 0.060 (tabel 5.7.). Hasil tersebut membuktikan bahwa PAD secara individual tidak mempengaruhi belanja modal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan peneliti sebelumnya.

Pengaruh *flypaper effect* terhadap prediksi belanja modal

Holtz-Eakin et al, dalam Maimunah (2008) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non-linier dan asymmetric. Hal yang sama juga juga dinyatakan oleh Halim (2004) bahwa daya prediksi DAU terhadap belanja daerah adalah

lebih kuat pada regresi dengan *lag* (DAU tahun 2001 terhadap belanja daerah tahun 2002).

Hipotesis ke empat (H_4) yang menyatakan terjadinya *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan diterima. Hasil yang didapat adalah nilai PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap belanja modal. Hal tersebut berarti telah terjadi *flypaper effect* karena sesuai dengan syarat kedua yaitu bila PAD tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis ke empat yang menyatakan terjadi *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan diterima.

Peneliti sebelumnya Halim (2004) telah meneliti apakah *flypaper effect* berpengaruh terhadap prediksi belanja daerah. Hal menarik dari hasil regresi dengan *lag* tersebut dengan ditemukannya *flypaper effect*, yakni signifikansi pengaruh DAU yang lebih tinggi daripada PAD. Artinya kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD, atau respon belanja daerah terhadap penerimaan DAU berbeda dengan penerimaan PAD. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan pengaruh DAU_{t-1} terhadap BD_t lebih besar daripada pengaruh PAD_{t-1} terhadap BD_t tidak dapat ditolak. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, baik dengan *lag* maupun tanpa *lag*. Ketika tidak menggunakan *lag*, pengaruh PAD terhadap Belanja daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi ketika menggunakan *lag*, pengaruh DAU terhadap belanja daerah justru lebih kuat daripada PAD. Hal ini berarti telah terjadi *flypaper effect* dalam respon Pemda terhadap DAU dan

PAD. Ketika kedua faktor (DAU dan PAD) diregres serentak terhadap BJD (belanja daerah), pengaruh keduanya juga signifikan, baik dengan ataupun tanpa *lag*. Dalam model prediksi BJD, daya prediksi DAU terhadap BJD tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD. Dengan demikian, memang telah terjadi *flypaper effect*.

Hipotesis kelima (H_5) ditolak hasil ketika digunakan *lag*, nilai koefisien DBH sebesar 0.283 lebih kecil dari DBH tanpa *lag* yaitu sebesar 0.297 sedangkan untuk PAD hasil yang didapat ketika digunakan *lag* nilai koefisien PAD sebesar 0.395 lebih besar dari PAD tanpa *lag* yaitu 0.276. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh DBH_{t-1} (2009) terhadap BM_t (2010) lebih kecil dari DBH_t (2009) terhadap BM_t (2009) sedangkan pengaruh PAD_{t-1} (2009) terhadap BM_t (2010) lebih besar dari PAD_t (2009) terhadap BM_t (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika jumlah dana bagi hasil yang diterima pada tahun sebelumnya kecil maka pemerintah kabupaten/kota berupaya menaikkan penggalan jumlah pendapatan asli daerah.

Dari hasil penelitian diatas didapat ketika digunakan *lag*, nilai koefisien DBH sebesar 0.527 lebih besar dari DBH tanpa *lag* yaitu sebesar 0.361 sedangkan untuk PAD hasil yang didapat ketika digunakan *lag* nilai koefisien PAD sebesar 0.181 lebih kecil dari PAD tanpa *lag* yaitu 0.437. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh DBH_{t-1} (2010) terhadap BM_t (2011) lebih besar dari DBH_t (2010) terhadap BM_t (2011) sedangkan pengaruh PAD_{t-1} (2010) terhadap BM_t (2011) lebih kecil dari PAD_t (2010) terhadap BM_t (2010). Pada sisi lain menunjukkan

transfer dari pemerintah pusat menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk menaikkan PAD. Hal ini dibuktikan ketika jumlah dana bagi hasil yang diperoleh pada tahun sebelumnya lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah PAD yang diterima.

Penelitian ini membuktikan bahwa besarnya belanja modal dipengaruhi oleh jumlah dana bagi hasil yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Artinya program otonomi daerah yang dilakukan pemerintah tidak berhasil, karena otonomi daerah menuntut pemerintah untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah *financial*.

Diperlukan langkah-langkah yang strategis dalam menggali sumber pendapatan asli daerah agar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat tidak berlanjut. Disisi lain efektifitas Belanja Daerah juga perlu menjadi perhatian, karena bukan rahasia umum lagi setiap akhir tahun anggaran terjadi penghabisan anggaran belanja hal ini menunjukkan bahwa Pemda “menunggu” beberapa alokasi dana yang diperolehnya sebelum menentukan berapa belanja yang akan dihabiskannya (Prakoso, 2004).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan:

1. Telah terjadi *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan, hal ini menunjukkan bahwa program

otonomi daerah di Sumatera Selatan tidak berhasil.

2. Ketika diuji dengan *lag*, nilai koefisien DBH lebih kecil dari DBH tanpa *lag* sedangkan untuk PAD hasil yang didapat ketika digunakan *lag* nilai koefisien PAD lebih besar dari PAD tanpa *lag*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh pengaruh DBH_{t-1} (2009) terhadap BM_t (2010) lebih kecil dari DBH_t (2009) terhadap BM_t (2009) sedangkan pengaruh PAD_{t-1} (2009) terhadap BM_t (2010) lebih besar dari PAD_t (2009) terhadap BM_t (2009).
3. Nilai koefisien DBH lebih besar dari DBH tanpa *lag* sedangkan untuk PAD hasil yang didapat ketika digunakan *lag* nilai koefisien PAD lebih kecil dari PAD tanpa *lag*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh pengaruh DBH_{t-1} (2010) terhadap BM_t (2011) lebih besar dari DBH_t (2010) terhadap BM_t (2011) sedangkan pengaruh PAD_{t-1} (2010) terhadap BM_t (2011) lebih kecil dari PAD_t (2010) terhadap BM_t (2010).

Saran

1. Saran untuk pemerintah yaitu agar dapat lebih mandiri dalam masalah *financial* dengan cara mengontrol jumlah belanja yang akan dikeluarkan pada tahun berikutnya.
2. Penelitian ini hanya mencakup wilayah kabupaten/kota di Sumatera Selatan, sehingga disarankan untuk peneliti sebelumnya mengambil sampel yang berbeda agar hasil penelitian dapat dibandingkan.

3. Penelitian ini menggunakan DBH sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan DAK karena belum ada yang menggunakan variabel tersebut.
4. Dibutuhkan pendekatan lain yang lebih feasible, misalnya dengan melakukan *field research* atau eksperimen (dengan subjek eksekutif dan legislatif daerah). Proksi perilaku pengalokasian sumber daya oleh Agents dan politisi belum dapat tergambar dengan baik.

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian hanya mencakup wilayah kabupaten/kota di Sumatera Selatan pada tahun 2009-2011.
2. Variabel independen yang diteliti hanya Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah saja sedangkan variabel dependennya lebih spesifik yaitu belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Darwanto. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah & Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal." *Symposium Nasional Akuntansi X. Makassar*.
- Daftar kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Diambil pada tanggal 5 Mei 2012 dari <http://www.id.wikipedia.org>.
- Halim. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kuncoro. 2007. "Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota & Kabupaten di Indonesia." *Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar*.
- Kusumadewi. 2007. "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum & Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Volume 11 nomor 1.
- Maimunah. 2008. "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) & Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera." *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, vol-11 nomor 1 (Januari).
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nordiawan. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010*. 2009. Bandung: Penerbit Fokusmedia.
- Prakoso. 2004. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) & Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia (JAAI)*, volume 8 nomor 2 (Desember).
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah*. 2011. Bandung: Penerbit Fokusmedia.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 2011. Bandung: Penerbit Fokusmedia.